



MENTERI KEUANGAN

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 15 /KMK.017/1998

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 220/KMK.017/1993 TENTANG BANK UMUM**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberi kesempatan investasi yang lebih luas bagi investor asing di bidang perbankan, dipandang perlu untuk mencabut ketentuan yang membatasi tempat kedudukan dan pembukaan kantor cabang bank campuran, serta kantor cabang pembantu dari kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri, dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 1992 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3655);

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 220/KMK.017/1993 tentang Bank Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 220/KMK.017/1993 TENTANG BANK UMUM.**

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 220/KMK.017/1993 tentang Bank Umum, sebagai berikut:



Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 15 /KMK.01/ 1998
Tanggal : 21 Januari 1998

MENTERI KEUANGAN

- 2 -

1. Mengubah Pasal 16, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 16

Dalam menjalankan usahanya, Bank Umum yang berbentuk Bank Campuran dapat memberikan jasa-jasa perbankan bagi nasabah di seluruh Indonesia.”

2. Mengubah Pasal 19, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 19

- (1) Pembukaan kantor cabang di dalam negeri dari Bank Umum, hanya dapat dilakukan dengan izin Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.
- (2) Izin pembukaan kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan apabila tingkat kesehatan dan permodalan bank yang bersangkutan selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) bulan tergolong sehat dan selebihnya cukup sehat.”

3. Mencabut ketentuan Pasal 27 ayat (4).

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara .

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 1998

Menteri Keuangan

ttd

Mar'ie Muhammad

